

PELUANG **GREEN ECONOMY** ATASI TANTANGAN EKONOMI GLOBAL 2023

13

Ariesy Tri Mauleny

Abstrak

Kemampuan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan the first shocked, mendorong untuk dapat menghadapi tantangan counter cyclical berikutnya yaitu perubahan iklim, krisis energi dan pangan serta inflasi tinggi yang menjadikan global crisis sebagai the next shocked bagi Indonesia di tahun 2023. Tulisan ini mengkaji bagaimana green economy bekerja, peluang mengatasi tantangan ekonomi global, dan upaya menyiapkan ekosistem bagi optimalnya green economy. Kesiapan ekosistem green economy harus didukung dengan kejelasan dukungan sektor keuangan baik dalam skema APBN maupun Non-APBN. Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% dari APBN setiap tahun, 88,1% mendukung infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi green economy. Pendanaan iklim Indonesia secara keseluruhan (Rp3,799 triliun), membuat pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi VII dan XI terus berinovasi mencari peluang pembiayaan nasional, regional, dan multilateral khususnya dalam pemenuhan komitmen iklim sehingga green economy dapat mempercepat dan memperluas produktivitas untuk menguatkan perekonomian di tahun 2023.

Pendahuluan

Indonesia *Economic Outlook* 2023 dari Badan Kebijakan Fiskal pada Oktober 2022 bertajuk “*Maximizing Indonesia’s Economic Momentum: Enriching Opportunities Through Green Economy*” fokus pada pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara yang berpotensi menimbulkan krisis utang dunia dan naiknya inflasi global tahun 2023, termasuk perubahan iklim yang semakin mengancam perekonomian (ekonomi.bisnis.com, 14 Oktober 2022).

Senior Resident Representative International Monetary Fund (IMF) menaruh harapan perekonomian Indonesia dapat terus bangkit di tengah tantangan global, perubahan iklim, dan semakin mengarah ke pembangunan ekonomi berkelanjutan. Asian Development Bank Deputy Director mendukung Indonesia dalam penerapan *green economy* yang berfokus pada prinsip pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusif menuju *net zero emission* (NZE) 2030 (adb.org, 2018).



Director for Environmental Affairs Bappenas menyakini implementasi *green economy* membuka potensi bisnis dengan beragam manfaat multisektoral. Namun aspek pembiayaan, sumber daya manusia, serta inovasi dan *Research and Development (RnD)* masih menjadi tantangan. *Chief Economist* BRI Danareksa Sekuritas menyebut kesiapan ekosistem harus didukung kejelasan pembiayaan sektor keuangan untuk menarik minat investor dan swasta. Kemampuan Indonesia mengatasi pandemi yang menjadi *the first shocked*, memberi dorongan dalam menghadapi tantangan *counter cyclical* berikutnya yaitu perubahan iklim, krisis energi dan pangan serta inflasi tinggi, menjadikan *global crisis* sebagai *the next shocked* berikutnya. Tulisan ini mengkaji bagaimana *green economy* bekerja dan peluangnya dalam mengatasi tantangan ekonomi global 2023.

Sekilas Green Economy

United Nations Environment Programme menyebut *green economy* sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi yang mendukung konsep tersebut. *Green economy* juga melibatkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, di samping efisiensi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan.

Kesadaran pentingnya pertumbuhan berkelanjutan dapat memberikan kemakmuran jangka menengah-panjang bagi Indonesia. DPR RI mendorong Pemerintah melalui Bappenas menyusun *Roadmap Green Economy*, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau secara

bertahap. Upaya menciptakan kondisi kondusif yang mendorong percepatan *green economy* di dalam dan lintas sektor, mengikuti proses perencanaan dan penganggaran hijau yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik, mendukung investasi kegiatan bertema keberlanjutan, serta pemantauan dan pengukuran kinerja pertumbuhan *green economy*. Selain itu, kebijakan Strategi Perencanaan dan Penganggaran Hijau, serta kebijakan Upaya Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan menjadi panduan teknis untuk mewujudkannya.

Kebijakan hijau jangka pendek membutuhkan biaya operasional dan investasi yang cukup tinggi di masa transisi. *Trade off* antara upaya pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi akan terus menjadi perdebatan di tengah besarnya risiko ketidakpastian global. Upaya mitigasi *trade off* dengan memaksimalkan sinergi dalam lingkup regional dan internasional akan memberi manfaat ekonomi yang besar dalam jangka pendek. Mulai dari perluasan kesempatan kerja, peningkatan efisiensi, maupun pengentasan kemiskinan.

Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2023

Proyeksi IMF Oktober 2022 memperkirakan, 31 negara akan terseret ke jurang resesi yang merepresentasikan sepertiga dari total pendapatan domestik bruto (PDB) dunia. Terjadi pergeseran prediksi dari sebelumnya pada Juli 2022 yang memperkirakan resesi 2023 hanya akan mengancam 15% dari perekonomian dunia. Bahkan pada April 2022, IMF menyebut resesi hanya akan berdampak terhadap 5% ekonomi global. IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan

ekonomi dunia dalam skenario optimis, dari 2,9% menjadi 2,7%. Bahkan skenario terburuk, prediksi ekonomi global bergerak di bawah 2% dan kemungkinan sekitar 10-15% ekonomi global hanya tumbuh di bawah 1%. Beberapa negara adidaya diperkirakan mengalami turbulensi, Inggris diprediksi hanya akan tumbuh 0,3% di tahun 2023 (katadata.co.id, 14 Oktober 2022).

Prediksi pelemahan juga disampaikan International Energy Agency (IEA) menyikapi keputusan OPEC yang memangkas produksi sehingga dikhawatirkan akan menaikkan harga minyak dunia (migas.esdm.go.id, 6 Desember 2022). Perekonomian Indonesia yang ditopang konsumsi domestik dinilai masih solid dan mencatat kinerja impresif dengan capaian 5,72% pada Triwulan III/2022. Kondisi perekonomian yang positif sepanjang tahun ini membuat pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi tahun 2023 masih bisa mencapai 5,3% (beritasatu.com, 5 November 2022). Proyeksi berbagai lembaga internasional menyebut ekonomi Indonesia mampu tumbuh 4,8% hingga 5,1% dan akan menjadi *the bright spot in the dark* (economy.okezone.com, 7 November 2022).

Optimis harus tetap diimbangi waspada dan antisipatif, mengingat kedalaman kontraksi yang dapat memicu krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi, belum sepenuhnya dapat diproyeksikan. Dibutuhkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebagai *shock absorber* dan *counter cyclical*, yang didesain semakin fleksibel dan responsif menjaga daya beli, memperkuat nilai tukar, dan memastikan defisit di bawah 3% tercapai.

Peluang *Green Economy* Atasi Tantangan Global 2023

Dengan tren pertumbuhan yang positif dan meningkat sejak Triwulan IV/2021 sampai Triwulan III/2022, pemerintah fokus mencari sumber-sumber pertumbuhan hijau yang menjamin keberlanjutan. Untuk tahun 2023, Indonesia telah menetapkan transisi ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang (voi.id, 25 April 2022).

Indonesia menjadi negara potensial ketiga dalam menciptakan lapangan kerja di bidang *green economy*, setelah AS dan Brazil. Jika Indonesia melakukan investasi 2% dari pendapatan negara untuk *green economy*, maka dalam lima tahun Indonesia bisa menciptakan 4,4 hingga 6,3 juta lapangan kerja baru (International Trade Union Confederation (ITUC), 2022). Alternatif pekerjaan yang tergolong *green jobs* antara lain pengolahan limbah, daur ulang sampah, pertanian organik, pembuatan panel surya, dan berbagai pekerjaan lain yang berorientasi lingkungan. Bisa juga penciptaan inovasi mesin baru yang ramah lingkungan. Peluang lainnya adalah dekarbonisasi sektor transportasi sesuai regulasi yang tertuang dalam UU No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021. Target penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2030, sekitar 29% dengan *business as usual* dan 41% dukungan internasional. Kesiapan ekosistem *green economy* harus didukung dengan kejelasan sektor keuangan baik dalam skema APBN maupun Non-APBN. Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% APBN setiap tahun, di mana 88,1% mendukung infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi *green economy*.

Pendanaan iklim Indonesia secara keseluruhan (Rp3,799 triliun), membuat pemerintah bersama DPR RI terus berinovasi mencari peluang pembiayaan baik nasional, regional, maupun multilateral untuk komitmen iklim. Salah satunya melalui penerapan kebijakan harga karbon (*carbon pricing*) berupa *carbon cap*, perdagangan karbon, dan pajak karbon pada tahun 2023. Apalagi *carbon pricing* diyakini akan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan perubahan iklim di masa mendatang. Dengan asumsi harga karbon USD20-25 per ton, dana yang dapat dihasilkan dari negara maju sebagai bentuk kompensasi paling sedikit mencapai USD375 miliar pada tahun 2023. Upaya pengembangan potensi pasar karbon domestik serta perbaikan regulasi pada tataran global, perlu menjadi prioritas penanganan. Hal mendasar lainnya adalah bagaimana memperluas pelibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam berbagai sektor dan level usaha *green economy*, antara lain melalui: pembentukan regulasi, pengembangan literasi, penyebarluasan dan pemanfaatan perangkat/ alat/mesin yang sejalan dengan *green economy* seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mobil listrik, kompor listrik, televisi digital dan lain sebagainya.

Komitmen Aksi Iklim untuk Kompensasi Negara Maju dan Swasta

Tersedia dana kompensasi bagi negara miskin dan berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar USD100 juta, terkonfirmasi pada COP-26 di Glasgow Scotland. COP-27 di Mesir mengenalkan skema finansial baru (sedikitnya USD20 billion) yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dalam

mencapai target *net zero emission* (NZE) hingga 2050. *New Collective Quantified Goal on Climate Finance* (NCQG) minimal USD100 miliar yang menjadi komitmen negara maju dan swasta untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C.

Indonesia dalam forum COP-27 membangun kemitraan iklim '*Rainforest Protection Pact*' bersama Brasil dan Kongo sebagai pemilik hutan hujan terbesar untuk membentuk mekanisme pendanaan yang membantu melestarikan hutan hujan tropis sebagai sumber penting penyerapan karbon dan melawan perubahan iklim. Pada waktu bersamaan G20 di Bali membentuk Kemitraan Transisi Energi Indonesia (*Just Energy Transition Partnership*/JETP) dengan target nilai investasi USD20 miliar di mana USD10 miliar dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah, serta USD10 miliar lainnya berasal dari pendanaan swasta. Dana tersebut akan digunakan untuk "pemensiunan dini" PLTU batu bara dan investasi di teknologi dan industri energi terbarukan (kemenkeu.go.id, 11 November 2022).

Indonesia pada forum *The 2nd Bright Green Summit* di Swedia menyatakan siap bermitra dengan perusahaan Swedia dan Eropa dalam *global supply chain* industri baterai dan pengembangan kendaraan listrik. Bahkan, perusahaan swasta AS turut menanti respons Indonesia dalam melebarkan ekspansi usahanya di Indonesia (ekon.go.id, 27 Oktober 2022). Hal ini didorong indikator ekonomi Indonesia yang terus menguat di 2022.

Kebijakan *Climate Budget Tagging* (CBT) menjadi peluang pendanaan iklim lainnya di mana daerah diuntungkan dengan investasi hijau karena pemerintah kabupaten/kota dan provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya

alamnya. Investasi hijau baik di sektor hulu maupun hilir di daerah, akan menggerakkan roda ekonomi lokal. Ini merupakan langkah optimis dalam menghadapi tantangan global tahun 2023, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai miniatur terlengkap *green economy*.

Penutup

Green economy sebagai ekonomi rendah karbon dan inklusif secara sosial, berpeluang meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan. *Green economy* juga melibatkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Di samping efisiensi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Kesiapan ekosistem *green economy* harus didorong dan didukung sektor keuangan untuk memperbesar peluang atasi tantangan global tahun 2023. Sekitar 4,1% dari APBN diproyeksikan setiap tahun untuk perubahan iklim, 88,1% untuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi *green economy*.

Besarnya kebutuhan pendanaan iklim Indonesia (Rp3,799 triliun), harus disiasati oleh pemerintah bersama DPR RI, khususnya Komisi VII dan Komisi XI untuk terus berinovasi mencari peluang pembiayaan nasional, regional, dan multilateral dalam komitmennya menjaga perubahan iklim. Dengan begitu *green economy* dapat mempercepat dan memperluas produktivitas dan menguatkan perekonomian tahun 2023.

Referensi

"A New Social Contract for Recovery and Resilience", 5 Desember 2022, <https://www.ituc-csi.org/120-statement-2022>, diakses 7 Desember 2022.

"Ancang-Ancang Indonesia Hadapi Resesi Global 2023", 14 Oktober 2022, <https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/63491324a9153/ancang-ancang-indonesia-hadapi-resesi-global-2023>, diakses 7 Desember 2022.

"Effective in 2023, The Government Continues to Promote Important Benefits Of A Green Economy", 25 April 2022, <https://voi.id/en/economy/161457/effective-in-2023-the-government-continues-to-promote-important-benefits-of-a-green-economy>, diakses 7 Desember 2022.

"Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon", 14 Maret 2022, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>, diakses 7 Desember 2022.

"Green Economy: The Main Focus of Investment in Indonesia", 7 Desember 2022, <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/green-economy-the-main-focus-of-investment-in-indonesia>, diakses 7 Desember 2022.

"Indonesia Economic Outlook 2023: Ajang Diskusi Perekonomian Masa Depan", 14 Oktober 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221014/9/1587652/indonesia-economic-outlook-2023-ajang-diskusi-perekonomian-masa-depan>, diakses 7 Desember 2022.

"Perlunya Integrasi Isu Perubahan Iklim ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan", 11 November 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi->

publik/publikasi/siaran-pers/COP-27,-Wamenkeu-Dorong-Perlunya-Integrasi-Isu, diakses 7 Desember 2022.

“Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023”, 11 November 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/09/27/110100426/sri-mulyani-sebut-ekonomi-dunia-bakal-resesi-pada-2023?page=all>, diakses 6 Desember 2022.

“Strategi 2030”, <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/464611/>, Juli 2018, diakses 7 Desember 2022.

“The 2nd Bright Green Summit”, 23 November 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4197/view/>, diakses 7 Desember 2022.



Ariesy Tri Mauleny
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E., Menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (2019), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, FEB UI (2007) dan Sarjana Sains di FMIPA UI (1997). Bekerja sebagai Analis Legislatif Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Kepakaran Kebijakan Ekonomi. Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: Penguatan Ekosistem Logistik untuk Daya Saing Indonesia (2020), Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia (2019), Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia (2018), Analisis Empiris Koperasi Indonesia (2018), Pemberdayaan UMKM dan Perekonomian Nasional: Perspektif Penjaminan (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.